

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
2025

PERBUP NO.60, BD TAHUN 2025/NO.60, 5 HALAMAN

Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

- ABSTRAK
- Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga ketentuan mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah wajib mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, tepat dan transparan menuntut adanya pembaruan serta penyesuaian kebijakan dalam bidang akuntansi pemerintah daerah, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan praktik pengelolaan keuangan daerah yang berkembang saat ini, dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3), Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 72), dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 73).

- CATATAN
- Dalam Peraturan Bupati Ini diatur mengenai pencabutan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025.